



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 11885-11894

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Pengaruh Investasi dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Antar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023)

Beta Risnawati¹, Gina Havieza Elmizan²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
betarisna30@gmail.com, ginahaviezaelmizan@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini ditandai oleh perbedaan pendapatan, kesempatan kerja, serta pembangunan infrastruktur antarwilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023 menunjukkan bahwa nilai Indeks Gini berada pada kisaran 0,194–0,394, dengan tingkat ketimpangan yang cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan kabupaten. Kondisi ini dipengaruhi oleh konsentrasi investasi dan aglomerasi ekonomi di wilayah yang lebih maju, sementara daerah yang relatif tertinggal masih kurang memperoleh perhatian pembangunan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi tidak merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan ekonomi perlu diminimalkan melalui prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara investasi, aglomerasi, dan ketimpangan ekonomi wilayah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan menggunakan metode data panel yang menggabungkan data time series dan cross section untuk menggambarkan dinamika ketimpangan ekonomi antarwilayah. Hasil analisis regresi menggunakan EViews 12 menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan ekonomi, namun tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan sekitar 12,06% variasi ketimpangan ekonomi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kata Kunci: Investasi, Aglomerasi, Ketimpangan Ekonomi, Sumatera Barat

1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih terus bergulat dengan isu ketimpangan ekonomi yang nyata (Dewi, F. P., Andriani, Widya, R. S., & Faricha, 2024). Masalah ini tampak dalam kesenjangan upah, pembangunan infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan kualitas tenaga kerja yang tidak merata di berbagai daerah (Rismaya & Yusuf, 2026). Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 63 Tahun 2020 yang mengklasifikasikan daerah tertinggal berdasarkan enam indikator kunci, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi prioritas utama (Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2020).

Dalam teori ekonomi, salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini, sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dan Smith. Indeks ini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1 (Syamsuddin, 2011). Nilai yang mendekati nol mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin adil, sementara nilai yang mendekati satu menunjukkan konsentrasi kekayaan yang tinggi dan ketimpangan yang semakin lebar. Indeks ini sering digunakan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi, mengevaluasi keberhasilan pembangunan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan redistribusi pendapatan. Semakin besar perbedaan tersebut, maka semakin tinggi tingkat ketimpangannya. Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Sumatera Barat, di mana nilai Indeks Gini kabupaten/kota pada periode 2018–2023 berada pada kategori rendah hingga sedang, namun menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kota-kota besar cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten, yang mengindikasikan belum meratanya distribusi pendapatan antarwilayah.

Tabel 1.1

Data Ketimpangan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (dalam desimal)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1	Kepulauan Mentawai	0,306	0,336	0,273	0,321	0,233	0,259	0,288
2	Pesisir Selatan	0,255	0,246	0,264	0,253	0,246	0,259	0,25383
3	Solok	0,303	0,285	0,277	0,246	0,243	0,235	0,26483
4	Sijunjung	0,3	0,293	0,269	0,27	0,243	0,263	0,273
5	Tanah Datar	0,288	0,278	0,273	0,25	0,251	0,26	0,26667
6	Padang Pariaman	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245	0,257	0,27017
7	Agam	0,257	0,251	0,278	0,272	0,298	0,255	0,2685
8	Lima Puluh Kota	0,283	0,238	0,222	0,244	0,208	0,194	0,2315
9	Pasaman	0,266	0,33	0,31	0,248	0,23	0,243	0,27117
10	Solok Selatan	0,309	0,295	0,307	0,277	0,253	0,271	0,28533
11	Dharmasraya	0,264	0,278	0,28	0,268	0,287	0,291	0,278
12	Pasaman Barat	0,29	0,283	0,258	0,261	0,277	0,238	0,26783
13	Kota Padang	0,344	0,312	0,312	0,343	0,354	0,312	0,3295
14	Kota Solok	0,296	0,271	0,286	0,277	0,288	0,256	0,279
15	Kota Sawah Lunto	0,31	0,289	0,3	0,295	0,314	0,308	0,30267
16	Kota Padang Panjang	0,29	0,322	0,394	0,306	0,296	0,273	0,3135
17	Kota Bukittinggi	0,337	0,267	0,265	0,286	0,317	0,255	0,28783
18	Kota Payakumbuh	0,302	0,276	0,325	0,316	0,311	0,316	0,30767

(Sumber Data BPS 2025)

Berdasarkan rata-rata indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di sebagian besar daerah berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan nilai yang umumnya berkisar antara 0,23 hingga 0,33. Daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di Kota Padang dengan rata-rata 0,3295, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 0,3135, Kota Payakumbuh sebesar 0,30767, serta Kota Sawahlunto sebesar 0,30267. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan akses terhadap lapangan pekerjaan, peluang usaha, serta konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sementara itu, daerah dengan tingkat ketimpangan paling rendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata 0,2315, diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,25383 dan Kabupaten.

Solok sebesar 0,26483. Nilai indeks gini yang relatif lebih rendah ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut lebih merata, yang kemungkinan dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian serta usaha masyarakat skala kecil.

Salah satu faktor yang berperan dalam ketimpangan ekonomi wilayah adalah investasi. Investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya cenderung terpusat di wilayah yang telah maju dan memiliki infrastruktur memadai (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Data realisasi investasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok antarwilayah, di mana sebagian daerah menerima aliran investasi yang besar, sementara daerah lainnya relatif tertinggal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi karena wilayah penerima investasi berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah dengan realisasi investasi rendah (Yuliadi, 2012).

Tabel 1.2

Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (dalam Desimal)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Kepulauan Mentawai	0,024	0,015	0,016	0,016	0,029	0,012	0,019
2	Pesisir Selatan	0,424	0,186	0,195	0,195	0,156	0,015	0,195
3	Solok	0,032	0,069	0,057	0,057	0,09	0,014	0,053
4	Sijunjung	0,053	0,133	0,024	0,024	0,141	0,256	0,105
5	Tanah Datar	0,004	0,021	0,004	0,004	0,012	0,016	0,01
6	Padang Pariaman	0,248	0,252	1,197	0,996	0,344	1,199	0,706
7	Agam	0,354	0,138	0,035	0,035	0,085	0,377	0,171
8	Lima Puluh Kota	0,009	0,054	0,255	0,255	0,283	0,283	0,19
9	Pasaman	0,001	0,039	0,001	0,001	0,024	0,066	0,022
10	Solok Selatan	0,571	0,412	0,827	0,827	0,252	0,236	0,521
11	Dharmasraya	0,036	0,016	0,014	0,014	0,334	0,879	0,216
12	Pasaman Barat	0,377	0,315	0,037	0,037	0,225	0,072	0,177
13	Kota Padang	0,339	1,436	0,484	0,484	0,52	0,609	0,645
14	Kota Solok	0,002	0,009	0,004	0,004	0,013	0,022	0,009
15	Kota Sawah Lunto	0	0,011	0	0,003	0,013	0,213	0,056
16	Kota Padang Panjang	0,004	0,014	0,027	0,027	0,012	0,01	0,01
17	Kota Bukittinggi	0,011	0,055	0,016	0,016	0,003	0,013	0,019
18	Kota Payakumbuh	0	0,01	0,008	0,008	0,017	0,058	0,017
19	Kota Pariaman	0,002	0	0,033	0,033	0,002	0,002	0,012

(Sumber Data BPS 2025 Diolah)

Berdasarkan rata-rata Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di sebagian besar daerah berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan nilai yang umumnya berkisar antara 0,23 hingga 0,33. Kota Padang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi dengan rata-rata 0,3295, diikuti oleh Kota Padang Panjang sebesar 0,3135, Kota Payakumbuh sebesar 0,30767, dan Kota Sawahlunto sebesar 0,30267. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan akses terhadap pekerjaan, peluang usaha, serta konsentrasi kegiatan ekonomi. Sementara itu, daerah dengan tingkat ketimpangan paling rendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata 0,2315, diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,25383 dan Kabupaten Solok sebesar 0,26483, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut relatif lebih merata karena struktur ekonomi yang lebih banyak didominasi oleh sektor pertanian dan usaha masyarakat skala kecil.

Selain investasi, aglomerasi ekonomi juga berkontribusi terhadap ketimpangan wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu mendorong efisiensi dan pertumbuhan yang lebih cepat, namun sekaligus menarik sumber daya dari daerah lain yang kurang berkembang (Mardiana et al., 2022). Data aglomerasi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara sebagian besar kabupaten berada pada tingkat aglomerasi rendah dan cenderung stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penyebaran pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara merata.

Tabel 1.3

Aglomerasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023 (dalam desimal)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	Kepulauan Mentawai	0,0565	0,0569	0,0613	0,0608	0,0607	0,0602	0,059
2	Pesisir Selatan	0,034	0,0342	0,0323	0,0326	0,0322	0,0319	0,033

3	Solok	0,0409	0,0411	0,0401	0,04	0,0396	0,0397	0,04
4	Sijunjung	0,0436	0,0433	0,0449	0,0449	0,0446	0,0446	0,044
5	Tanah Datar	0,0422	0,0426	0,0404	0,0404	0,0399	0,0399	0,041
6	Padang Pariaman	0,0594	0,0578	0,0481	0,0471	0,0503	0,0517	0,052
7	Agam	0,0471	0,0472	0,0445	0,0445	0,0441	0,0441	0,045
8	Lima Puluh Kota	0,0459	0,0461	0,0468	0,0466	0,0459	0,046	0,046
9	Pasaman	0,0359	0,0357	0,0346	0,0346	0,0339	0,0338	0,035
10	Solok Selatan	0,0372	0,0366	0,0352	0,0349	0,0344	0,0342	0,035
11	Dharmasraya	0,0482	0,0467	0,0518	0,0518	0,0521	0,0518	0,05
12	Pasaman Barat	0,0402	0,039	0,0409	0,0406	0,0405	0,0404	0,04
13	Kota Padang	0,0735	0,0739	0,0789	0,079	0,0787	0,0787	0,077
14	Kota Solok	0,0641	0,0641	0,0637	0,0635	0,0632	0,0629	0,064
15	Kota Sawah Lunto	0,066	0,0665	0,0649	0,0652	0,066	0,0663	0,066
16	Kota Padang Panjang	0,0724	0,0729	0,0714	0,0715	0,0711	0,071	0,072
17	Kota Bukittinggi	0,0747	0,0748	0,0823	0,0825	0,0832	0,0835	0,08
18	Kota Payakumbuh	0,0551	0,0566	0,0566	0,0577	0,058	0,0577	0,057
19	Kota Pariaman	0,0632	0,0637	0,0613	0,0617	0,0615	0,0616	0,062

(Sumber Data BPS 2025 Diolah)

Berdasarkan data pemusatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat, terlihat adanya perbedaan antara daerah dengan tingkat pemusatan tinggi dan rendah. Padang Pariaman (0,706) dan Kota Padang (0,645) menunjukkan pemusatan pertumbuhan yang tinggi sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama.

Sebaliknya, Kota Solok (0,009), Tanah Datar (0,010), dan Kota Pariaman (0,012) memiliki pemusatan yang rendah, yang menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut terhadap pertumbuhan regional masih kecil.

Berdasarkan kajian nilai-nilai ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dan pemerataan, kesenjangan ekonomi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip distribusi kekayaan yang adil dan berimbang. Al-Qur'an dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi hanya di kalangan minoritas (Mely Bilqisti Aula, 2025). Implikasinya, arah pembangunan suatu wilayah tidak boleh sekadar berorientasi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, namun juga harus mengutamakan pencapaian kesejahteraan yang merata dan inklusif (*falah*) bagi seluruh lapisan masyarakat (Himawan Arif Sutanto, 2024).

Di Provinsi Sumatera Barat, isu ketimpangan ekonomi antar wilayah masih merupakan persoalan mendesak yang memerlukan analisis lebih lanjut. Bertolak dari kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk menelaah dampak dari variabel investasi dan aglomerasi terhadap tingkat ketimpangan ekonomi dengan perspektif Ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan konseptual yang kuat bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan merata (Amika et al., 2024).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan menjelaskan fenomena ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat (Mardhian et al., 2023). Data yang digunakan adalah data sekunder periode 2018–2023 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10797>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Barat serta sumber pendukung lainnya seperti laporan pemerintah, jurnal, buku, dan publikasi ilmiah terkait. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan Rasio Gini, sedangkan variabel bebas meliputi investasi yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), serta aglomerasi ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan tahapan pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Persamaan regresi digunakan untuk mengukur pengaruh PMDN, PMA, dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan multikolinearitas untuk memastikan kelayakan model (Hutagaol, 2025). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel bebas terhadap ketimpangan ekonomi, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi ketimpangan ekonomi (Aini et al., 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Pemilihan Model data Panel
 - a. Uji chow

Tabel 1.4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.472487	(18,93)	0.0026
Cross-section Chi-square	44.580736	18	0.0005

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Nilai prob 0,0005 < 0,05 maka yang terpilih fixed effect model (FEM).

- b. Hasil Uji Hausman

Tabel 1.5
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.854041	2	0.6525

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Nilai prob 0,6525 > 0,05 maka yang terpilih Random Effect Model (REM).

- c. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Tabel 1.6
Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.321436 (0.0023)	9.613681 (0.0019)	18.93512 (0.0000)
Honda	3.053103 (0.0011)	3.100594 (0.0010)	4.351320 (0.0000)
King-Wu	3.053103 (0.0011)	3.100594 (0.0010)	4.166462 (0.0000)
Standardized Honda	3.623649 (0.0001)	3.612432 (0.0002)	1.294535 (0.0977)
Standardized King-Wu	3.623649 (0.0001)	3.612432 (0.0002)	1.587693 (0.0562)
Gourieroux, et al.	--	--	18.93512 (0.0000)

Nilai probabilitas $0,0023 < 0,05$ Maka Model Yang terpilih Random effect model (REM).

Tabel 1.7
Hasil Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/02/26 Time: 23:21
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 19
 Total panel (balanced) observations: 114
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.222985	0.014676	15.19364	0.0000
X1	-1.57E-05	0.010810	-0.001452	0.9988
X2	1.099781	0.264777	4.153620	0.0001

(Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025))

Variabel x1 investasi memiliki nilai t statistika sebesar 0,001452 dengan probabilitas (sig) sebesar $0,9988 > 0,05$ maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel investasi tidak berpengaruh terhadap Variabel ketimpangan ekonomi Variabel X2 aglomerasi memiliki nilai t statistik sebesar 4,153620 dengan nilai probabilitas (sig) sebesar $0,0001 < 0,05$ maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa variabel aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Kiton, 2019).

Persamaan Regresi Random Effect Model

Estimation Command:

LS(?, CX=R) Y C X1 X2

Estimation Equation:

$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + [CX=R]$

Substituted Coefficients:

$Y = 0.222985167632 - 1.56937488204e-05*X1 + 1.09978149819*X2 + [CX=R]$

Koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

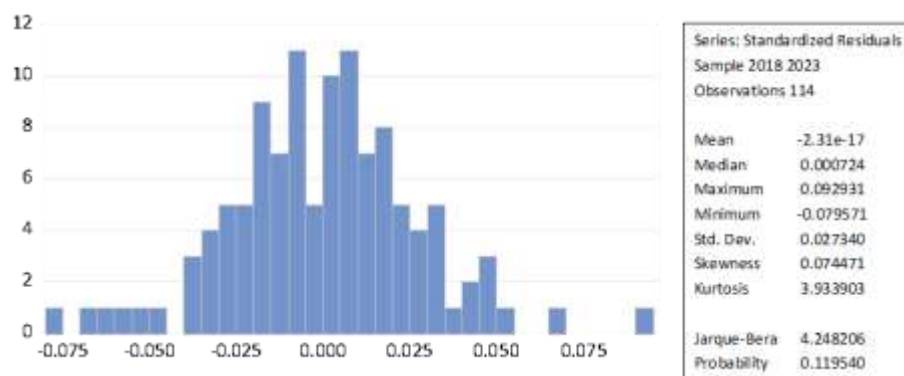
- Nilai konstanta sebesar 0,222985 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu investasi dan aglomerasi bernilai nol, maka ketimpangan ekonomi tetap berada pada angka 22,2%. Dengan kata lain, konstanta ini merepresentasikan titik awal ketimpangan ekonomi sebelum adanya pengaruh dari variabel investasi maupun aglomerasi.
- Koefisien regresi investasi sebesar -1,569374 menunjukkan adanya hubungan negatif antara investasi dan ketimpangan ekonomi. Hal ini berarti, setiap tambahan 1 satuan investasi akan menurunkan ketimpangan ekonomi sebesar 156,9%. Dengan demikian, investasi berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, karena peningkatan investasi secara rata-rata akan menurunkan disparitas pendapatan di masyarakat.
- Koefisien regresi aglomerasi sebesar 1,09978 menunjukkan hubungan positif antara aglomerasi dan ketimpangan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan aglomerasi akan meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 109,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat aglomerasi atau konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, semakin besar pula ketimpangan ekonomi yang terjadi.

2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan Uji Chow, Uji Housman, dan Uji LM maka model yang terbaik dalam penelitian yaitu Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pemilihan model estimasi, Random Effect Model (REM) dipilih sebagai model terbaik karena menggunakan pendekatan Generalized Least Squares (GLS) yang sudah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Metode GLS secara otomatis mengakomodir adanya autokorelasi dan heteroskedastisitas, sehingga uji asumsi klasik seperti uji heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak diperlukan secara terpisah. Namun, uji asumsi klasik lain tetap dilakukan untuk memastikan validitas model, yaitu uji normalitas residual untuk memeriksa distribusi residual dan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen (Nursan, 2025).

Tabel 1.10

Hasil Uji Normalitas



(Sumber:

output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Berdasarkan uji normalitas jika probability jarque $4,2482606 < 0,05$ maka data berdistribusi secara normal Sedangkan untuk *probability jarque-bera* 0,119540 maka dapat di simpulkan bahwa data berdistribusi normal

Tabel 1.11

Uji Multikoliniearitas

	X2	X1
X2	1	-0.0526700...
X1	-0.0526700...	1

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi, diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel ketimpangan ekonomi X, dan X2 sebesar 0,0526700. Nilai korelasi tersebut sangat kecil dan jauh di bawah batas umum 0,85 yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X, dan X2 sangat lemah, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Dengan demikian, masing-masing variabel ketimpangan ekonomi dapat digunakan dalam model karena tidak saling memengaruhi secara kuat satu sama lain.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat seberapa meningkat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah terhadap variabel yang diteliti, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Dari uji ini, kita dapat mengetahui pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan aglomerasi terhadap Ketimpangan ekonomi di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada tahun 2018–2023. Hasil pengujian masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut, yang menunjukkan variabel mana yang benar-benar memengaruhi tingkat Ketimpangan ekonomi (Ersad et al., 2022).

Tabel 1.11

Hasil Uji t (Parsial)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 03/02/26 Time: 23:21				
Sample: 2018 2023				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 19				
Total panel (balanced) observations: 114				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.222985	0.014676	15.19364	0.0000
X1	-1.57E-05	0.010810	-0.001452	0.9988
X2	1.099781	0.264777	4.153620	0.0001

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Dari hasil Uji t pada Variabel investasi (X1) di peroleh t statistik sebesar 0,001452 dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,9988 > 0,05 maka H₁ ditolak dan H₀ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018–2023. Sementara itu, variabel aglomerasi menghasilkan nilai t statistik sebesar 4,153620 dengan nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,0001 < 0,05. Dengan demikian, H₁ diterima dan H₀ ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018–2023.

b. Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel ketimpangan ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi (R. Didi Djadjuli, 2018). Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk melihat apakah investasi (X₁) dan aglomerasi (X₂) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (Y).

Tabel 1.12
Hasil Uji F (Simultan)
Weighted Statistics

R-squared	0.136230	Mean dependent var	0.170903
Adjusted R-squared	0.120667	S.D. dependent var	0.026267
S.E. of regression	0.024632	Sum squared resid	0.067346
F-statistic	8.753226	Durbin-Watson stat	1.447156
Prob(F-statistic)	0.000295		

Sumber: output Eviews 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (*probability*) meningkat 0,05. Nilai F statistik sebesar 8,753226 dengan probabilitas 0,000295 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, variabel investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2018-2023.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu, di mana nilai nol menunjukkan model tidak mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi sama sekali, sedangkan nilai satu menunjukkan model sepenuhnya mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi tersebut.

Tabel 1.13

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Weighted Statistics			
R-squared	0.136230	Mean dependent var	0.170903
Adjusted R-squared	0.120667	S.D. dependent var	0.026267
S.E. of regression	0.024632	Sum squared resid	0.067346
F-statistic	8.753226	Durbin-Watson stat	1.447156
Prob(F-statistic)	0.000295		

outSumber output EVIEWS 12 SV, (Data Sekunder diolah Tahun 2025)

Koefisien determinasi (*Adjusted-square*) sebesar 0,120667 menunjukkan bahwa variabel ketimpangan ekonomi dalam model mampu menjelaskan ketimpangan ekonomi variabel ketimpangan ekonomi meningkat 12,06 sedangkan sisanya 87,94 % dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pembahasan

1. Pengaruh secara Parsial Investasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil regresi menggunakan EVIEWS 12, uji t menunjukkan bahwa variabel investasi (X_1) memiliki t statistik 0,001452 dengan probabilitas 0,9988 > 0,05, sehingga tidak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023. Koefisien regresi investasi sebesar -1,569374 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 satuan investasi dapat menurunkan ketimpangan ekonomi sebesar 156,9%, sehingga investasi tetap berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

2. Pengaruh secara Parsial Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi dengan EVIEWS 9, variabel aglomerasi menunjukkan nilai t statistik sebesar 4,153620 dengan probabilitas (Sig) 0,0001 < 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga aglomerasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018–2023. Koefisien regresi aglomerasi sebesar 1,09978 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan 1 satuan aglomerasi akan meningkatkan ketimpangan ekonomi sebesar 109,9%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wella Amalia Yanuarti yang menyatakan bahwa aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, mengindikasikan bahwa semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah, semakin besar ketimpangan ekonomi yang terjadi (Wella Amalia Yanuarti, 2022).

3. Pengaruh secara simultan investasi dan aglomerasi terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023

Hasil pengujian dengan koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) sebesar 0,120667 menunjukkan bahwa variabel investasi dan aglomerasi secara bersama-sama menjelaskan sekitar 12,06% perubahan ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023, sedangkan sisanya 87,94% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *Adjusted R^2* yang signifikan menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya investasi dan aglomerasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan variabel serupa dapat menjelaskan hingga 87,15% ketimpangan, sehingga menegaskan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap ketimpangan ekonomi dapat berbeda tergantung kondisi yang diteliti.

5. Kesimpulan

Secara parsial, variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023. Meskipun koefisien regresi menunjukkan hubungan negatif yang berarti investasi cenderung menurunkan ketimpangan, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Secara

parsial, variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah, maka ketimpangan ekonomi cenderung semakin meningkat. Secara simultan, investasi dan aglomerasi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Namun, kemampuan kedua variabel tersebut dalam menjelaskan ketimpangan relatif kecil, yaitu sebesar 12,06%, sementara sebagian besar ketimpangan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Referensi

1. Aini, U., Idrus, S., & Jumail, M. (2021). PELATIHAN PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIKA DASAR DENGAN SOFTWARE. *Budimas*, 1(2), 103–118.
2. Amika, F. Z., Sulistyowati, T., & Sulismaidi, S. (2024). Pendekatan Berkeadilan dalam Pembangunan Masyarakat: Studi Literatur Komprehensif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 957–972. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12574>
3. Dewi, F. P., Andriani, Widya, R. S., & Faricha, L. N. (2024). Problematika ketimpangan ekonomi dalam sistem. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163–172.
4. Ersad, M. E., Amir, A., & Zulgani, Z. (2022). Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(2), 425–438. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.15614>
5. Himawan Arif Sutanto. (2024). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. PT Penerbit Naga Pustaka
6. Hutagaol, K. (2025). Kajian Tentang Uji Asumsi Klasik Berbantuan Spss. *Jurnal Padagogik*, 8(2), 15–28.
7. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). Peraturan presiden Republik Indonesia No. 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020–2024. *Kementerian Sekretariat Negara*, (018390), 1–8. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136563/perpres-no-63-tahun-2020>
8. Kiton, M. A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, 3(2), 68–80. <http://stmb-multismart.ac.id/ejournal>
9. Mardhian, D., Yulianita, A., & Mukhlis, M. (2023). Ketimpangan dan Prospek Perekonomian di Pulau Sumatera. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 4–7. <https://doi.org/10.37034/infbev.v5i3.612>
10. Mardiana, A., Widayanti, S., Soedarto, T., & Atasa, D. (2022). Kabupaten Sumenep Risk Management Analysis Of Tobacco Farming In Prancak Village Pasongsongan District Sumenep Regency. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(2), 680–698.
11. Mely Bilqisti Aula. (2025). Tafsir QS. Al-Hasyr Ayat 7 tentang Konsep HAM dan Distribusi Kekayaan di Tengah Krisis Ekonomi Global. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 3(1 November), 54–63. <https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.48>
12. Nursan, A. muhammad. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel*. Pustaka Bangsa.
13. R. Didi Djadjuli. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
14. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *Perekonomian Indonesia* (Vol. 2). CV BRAVO PRESS INDONESIA.
15. Rismaya, E., & Yusuf, A. A. (2026). Persistence of Labor Market Disparities in Indonesia : An Analysis of Regional Productivity and Wage Persistensi Disparitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia : Analisis Kesenjangan Produktivitas dan Upah Regional 2018 – 2023. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Un. Of Society and Development*, 2018–2023.
16. Syamsuddin, H. (2011). Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(4), 83–102. <https://media.neliti.com/media/publications/43326-ID-perhitungan-indeks-gini-ratio-dan-analisis-kesenjangan-distribusi-pendapatan-kab.pdf>
17. Wella Amalia Yanuarti, L. R. (2022). Wella Amalia Yanuarti, Lucky Rachmawati. *INDEPENDENT : Journal Of Economics E-ISSN : 2798-5008*, 2, 14–26.
18. Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan Investasi Dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 276. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.174>